

ANALISIS POTENSI RETRIBUSI OBJEK WISATA PANTAI BASE-G DI KOTA JAYAPURA

Damaris M. Youwe¹

dhamaris_youwe@yahoo.com

Mesak Ick²

imesakick@yahoo.com

Agustina Sanggrangbano³

ina_djarum@yahoo.com

Abstrak

Papua memiliki potensi yang cukup besar dari sektor pariwisata untuk menyumbangkan PAD kepada pemerintah daerah. Potensi ini merupakan sumber pendapatan bagi Papua, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki objek wisata. Salah satu dari daerah tersebut ialah Jayapura sebagai ibukota provinsi. Objek wisata yang terdapat di Kota Jayapura salah satunya ialah objek wisata Pantai Pantai Base-G. Tujuan dari Penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar potensi retribusi yang dapat di hasilkan dari objek wisata Pantai Base-G Kota Jayapura serta Mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi pungutan retribusi di Pantai Base-G Kota Jayapura. Penelitian ini di analisis dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Dimana retribusi per tahun dihitung dengan cara: jumlah pengunjung x dengan tarif retribusi x dengan 365 hari dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pungutan Retribusi dalam pengelolaan objek wisata Pantai Base-G, peneliti menggunakan alat analisis SWOT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Dalam setahun pendapatan yang bisa di hasilkan dari loket masuk Objek wisata Pantai Base-G saat ini yaitu Rp.96.000.000. Sedangkan perhitungan setelah adanya retribusi total pendapatan yang di hasilkan per tahun dari Objek wisata Pantai Base-G yaitu mencapai Rp.2.470.000.000. Masih kurangnya tingkat koordinasi antara pemerintah daerah setempat dan instansi pemerintahan yang terkait. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang. Tarif yang masih beragam sesuai dengan keinginan pemilik tempat objek wisata.

Kata Kunci : Potensi Retribusi, Wisata Pantai, Pantai Base-G Jayapura

PENDAHULUAN

Pada era otonomi daerah ini, pemerintah daerah dituntut untuk mencari sumber dana secara mandiri dengan cara menggali potensi daerah yang dimiliki. Besarnya potensi yang dimiliki merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin dan biaya pembangunan daerah, walaupun ada dana transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah,

¹ Alumni Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih

peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain – lain pendapatan. Berdasarkan pasal 6 UU No 34 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dan pusat, peningkatan pendapatan asli daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan (i) pajak daerah (ii) retribusi daerah (iii) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (iv) lain – lain PAD yang sah.

Papua memiliki potensi yang cukup besar dari sektor pariwisata untuk menyumbangkan PAD kepada pemerintah daerah. Potensi ini merupakan sumber pendapatan bagi Papua, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki potensi objek wisata. Salah satu dari daerah tersebut ialah Jayapura sebagai ibukota provinsi. Objek wisata yang terdapat di kota Jayapura salah satunya ialah objek wisata Pantai. Pantai Base G merupakan salah satu pantai yang cukup populer di kalangan masyarakat Jayapura. Pantai ini berhadapan langsung dengan Samudera Pasifik dan hasil lautnya sudah cukup terkenal di Kota Jayapura. Wilayah pantai ini sangat jernih dan mempunyai kharisma unik sendiri.

Namun demikian, pengelolaan pantai Base G dengan keindahan alami tersebut belum dikelola secara optimal oleh masyarakat setempat dan juga belum ada campur tangan dari Pemerintah Daerah. Campur tangan dalam arti belum adanya kerjasama dengan pemerintah daerah setempat, dalam hal tarif masuk atau retribusi. Selain itu, penetapan ongkos untuk pemakaian lahan lokasi juga cenderung berbeda-beda, sehingga tak jarang di temukan penetapan tarif yang di lakukan oleh pemilik tempat sendiri sangat mahal. Mahalnya ongkos ini di temukan pada setiap lokasi yang terdapat pondok duduk dan tempat beristirahatnya. Dengan tarif yang tidak seragam dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Penelitian ini bukan hanya menginventarisir unsur-unsur fenomena wisata, tetapi juga harapan masyarakat sekitar lokasi wisata tersebut terhadap pengembangan objek wisata pantai. Lebih dari itu, penelitian ini juga merupakan sebuah dasar menentukan kebijakan pengembangan pantai Base-G dan menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan langkah-langkah strategis membantu masyarakat sebagai pemilik hak ulayat di mana pantai Base-G berada dan juga kepada Instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Topik penelitian ini adalah “Potensi retribusi objek wisata pantai Base-G di kota Jayapura”. Dalam penelitian ini peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Seberapa besar potensi penerimaan retribusi dari objek wisata pantai Base-G dan Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kurang optimalnya pungutan retribusi dalam pengelolaan pantai Base-G. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar potensi retribusi yang dapat di hasilkan dari objek wisata pantai Base-G Kota Jayapura juga mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi pungutan retribusi di pantai Base-G Kota Jayapura.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah Pantai Base G, Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, jenis data Primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lokasi penelitian. Yakni Pantai Base G dan masyarakat lokal yang mengelola, melalui observasi, wawancara dan melalui study lapangan (*field Research*) serta Dinas Pariwisata Kota Jayapura dan Dinas Pendapatan Kota Jayapura. Sementara itu data sekunder diperoleh tidak langsung melalui kajian kepustakaan atas berbagai literature dan dokumen yang terkait dengan objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi.

Dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini, digunakan alat analisis dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Peneliti menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui seberapa besar potensi penerimaan retribusi dari objek wisata pantai Base-G, peneliti menggunakan pengolahan secara kuantitatif, dengan rumus:

Penerimaan Retribusi Perhari = Jumlah Pengunjung x Tarif Retribusi x 1 Hari
Penerimaan Retribusi Pertahun = Jumlah Pengunjung x Tarif Retribusi x 365 Hari

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pungutan Retribusi dalam pengelolaan objek wisata Pantai Base-G, peneliti menggunakan alat analisis SWOT (Strong, Weakness, Opportunity, Threats) (Rangkuti Freddy, 2002:18).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tarif Masuk Objek Wisata Pantai Base-G

Besarnya tarif masuk objek wisata pantai Base-G saat ini sebagai berikut :

Tabel 1. Tarif Masuk Objek Wisata Pantai Base-G Berdasarkan Kriteria

No	Kriteria	Data Lapangan
1	Waktu Kunjungan	Sabtu-Minggu
2	Harga Karcis Per Kepala	Rp 2.000,-
3	Jumlah Kunjungan Wisatawan per Minggu	800-1000an wisatawan
4	Pendapatan	Rp. 1.600.000 – Rp. 2.000.000,-
5	Pengelola	Asuransi dan Kelompok Pemuda
6	Bagi Hasil	@Rp.25.000 per pemuda ; sisanya di bagi 50% untuk asuransi dan 50% kas kelompok pemuda.
7	Peruntukan	<ul style="list-style-type: none"> • Dana asuransi untuk perlindungan pengunjung bila mengalami kecelakaan, • Kas kelompok pemuda untuk keperluan sosial

Sumber : Hasil Survei, 2014

Dari data di atas menunjukkan bahwa waktu bagi kunjungan yang dikelola di objek wisata Pantai Base-G umumnya terjadi pada sabtu, minggu dan pada hari libur. Harga karcis masuk sebesar Rp. 2.000,- per kepala. Dengan jumlah kunjungan antara 800-1000an wisatawan per minggunya, berarti perolehan dana loket masuk di objek wisata Pantai Base-G rata-rata mencapai Rp. 1.600.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- setiap minggunya. 5-7 orang yang menjaga, dan masing-masing dari mereka memperoleh Rp.25.000,- setiap kali penjagaan. Artinya, pengeluaran untuk pemuda yang menjaga loket itu berkisar antara Rp. 125.000,- sampai Rp. 175.000,-. Pemasukan rata-rata yang diterima per minggu di kurangi dengan pembayaran untuk para pemuda yang berjaga kemudian uang yang tersisa dibagi dua sebesar 50% untuk asuransi dan 50% untuk lagi untuk kas pemuda. Dana asuransi ini di berikan bila ada pengunjung yang mengalami kecelakaan selama berwisata, sementara kas pemuda digunakan bila ada anak dari kampung Kayu Batu mengalami kesulitan biaya sekolah atau keperluan sosial yang lain. Dengan pendapatan perminggunya berkisar antara Rp.1.600.00,- sampai dengan Rp.2.000.000,-. Maka dalam sebulan dapat menghasilkan pendapatan antara Rp.6.400.000,- sampai Rp.8.000.000. Dalam setahun dapat menghasilkan pendapatan antara Rp.76.800.000,- Rp.96.000.000,-. Jadi dalam setahun pendapatan yang bisa di hasilkan dari loket masuk objek wisata Pantai Base-G saat ini yaitu berkisar antara Rp.76.800.000,-Rp.96.000.000,- ini terlepas dari setiap tempat/lokasi yang terdapat di dalam objek wisata tersebut.

2. Pengelolaan Pemerintah Daerah atas Pantai Base-G

Bagi Pemerintah Kota Jayapura, peran dari masyarakat pemilik atau pengelola lokasi wisata di Pantai Base-G, pada tingkat pengelola lokasi pantai, perlu di perhatikan karena kehadiran mereka di sana sangat penting bagi pengembangan industri wisata di pantai base-g. Hanya saja, harus di akui bahwa salah satu kekurangan mendasar pengembangan lokasi wisata di pantai Base-G adalah masih kurangnya sumber daya manusia di kampung kayubatu adalah pengetahuan dan ketrampilan mengenai pengembangan objek dan atraksi wisata modern. Pengetahuan dan ketrampilan tersebut perlu di tambahkan kepada para pengelola pantai, sehingga dapat meningkatkan pelayanan wisata yang memuaskan pengunjung yang datang ke Pantai Base-G. Disamping itu, pemerintah Kota Jayapura juga perlu memperhatikan faktor penting lainnya, yaitu pelayanan fisik berupa saran-prasarana maupun pelayanan langsung kepada wisatawan. berpartisipasi aktif dalam pengelolaan objek dan atraksi wisata tersebut.

Pemerintah dalam pengelolaan Objek wisata Pantai Base-G dapat melakukan berbagai program, diantaranya yaitu : pembangunan infrastruktur, shelter, tiang lampu pantai, pengelolaan loket masuk objek wisata dan keamanan pariwisata. Dinas Pariwisata Kota Jayapura pada dasarnya menyadari bahwa program dan kegiatan pembangunan pariwisata di pantai Base-G harus di dasarkan pada aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal. Pada dasarnya, instansi yang terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota

Jayapura, sudah berusaha untuk membangun hubungan kerja dengan pemilik dan pengelola lokasi wisata di Pantai Base-G. Dinas Pariwisata Kota menawarkan mengelola pantai Base-G dan hasilnya di bagi dua (system bagi-hasil) dengan pemilik lokasi wisata, dan kepada masyarakat di tawarkan untuk mengambil bagian hasil usaha pantai dari Dinas Pariwisata kapan saja mereka mau. Akan tetapi, ada yang menerima dan ada juga yang menolak tawaran ini, Dalam rangka mengatasi masalah tersebut, Dinas Pariwisata Kota Jayapura melakukan beberapa upaya seperti membangun komunikasi yang baik kepada masyarakat adat dengan memberikan berbagai pemahaman dan pemberian pembinaan untuk mememanajemenkan pengelolaan retribusinya. Selama ini dari Dinas Pariwisata telah melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dan sudah beberapa kali mengadakan diskusi dengan masyarakat. Hanya saja, masyarakat sendiri tidak memahami prakarsa dari Dinas Pariwisata, yang pada dasarnya di arahkan untuk meningkatkan kunjungan para wisatawan ke Pantai Base-G. pada gilirannya meningkatnya kunjungan wisatawan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sendiri.

Seperti dikemukakan diatas, system kepemilikan pengelolaan lahan di Pantai Base-G selama ini cenderung bersifat komunal berbasis kekerabatan atau kekeluargaan, walau saat ini sudah di kelola secara individual. Karena itu, masyarakat lokal belum memberikan konsensus tentang pengelolaan berbasis bagi-hasil yang dilakukan Pemerintah Kota. Masyarakat sendiri berharap supaya Pemerintah Daerah hanya membangun, sementara pengelolaannya diserahkan pada masyarakat lokal, begitu pula dengan hasilnya. Karena belum ada kesepakatan mengenai hak penetapan retribusi atas objek wisata tersebut, Dinas Pariwisata Kota Jayapura juga belum mempunyai program dan kegiatan pembangunan Pantai Base-G secara berarti. Dampak dari belum adanya kesepakatan tersebut adalah masih terbatasnya keterlibatan Dinas Pariwisata Kota Jayapura dalam pengembangan infrastruktur maupun fasilitas pendukung objek wisata tersebut. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa sampai saat ini pengembangan Pantai Base-G hanya dilakukan sebatas mendirikan tempat-tempat istirahat (shetler) bagi para pengunjung. Shelter ini merupakan bagian dari program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kota Jayapura sebagai wujud kepedulian Pemerintah Daerah dalam membangun pariwisata lokal. Hanya saja, pembangunan tempat-tempat istirahat ini cenderung tidak didasarkan pada aspirasi dan kepentingan masyarakat, sehingga ketika sudah dibangun, tidak sedikit fasilitas tersebut mengalami kerusakan karena kurangnya perawatan.

3. Sistem Pungutan Retribusi Ojek Wisata Pantai Base-G

Pungutan retribusi yang di lakukan hampir pada tiap-tiap hari, namun pendapatan yang dihasilkanpun berbeda antara hari biasa (senin-jumat), dengan hari sabtu atau hari minggu maupun hari libur. Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jayapura telah menetapkan kebijakan untuk menjadikan objek wisata pantai base-g ini sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pengelolaan yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Jayapura adalah dengan melakukan kerjasama pengelolaan dengan masyarakat lokal dalam rangka mengolah objek wisata pantai ini, serta melakukan koordinasi kerja

dengan mulai pemungutan pajak dari para pedagang yang berjualan dilokasi pantai. Hanya saja, program Dispenda Kota Jayapura ini masih mengalami banyak kendala karena masyarakat setempat merasa bahwa Pemerintah Kota Jayapura belum memberikan sejenis kompensasi yang setimpal bagi mereka. Disamping itu, Dinas pariwisata telah berusaha memberitahu masyarakat bahwa apabila para pengunjung yang menggunakan sudah berada di lokasi wisata, diharapkan mereka tidak dimintai ongkos parkir lagi karena mereka sudah di minta untuk membayar di pintu masuk. Hanya saja, para pemillik lokasi masih bersikeras untuk tetap mengenakan sewa penggunaan lokasi dilahan masing-masing. Selain itu Dinas Pariwisata juga sudah berusaha datang ke tempat pemilik usaha dan berdiskusi dengan kelompok ibu-ibu pengelola tempat wisata. Dari pihak Pariwisata Kota memberikan saran supaya para ibu pengelola tempat wisata ini membuat proposal untuk kelompok usaha pengelola tempat wisata ini membuat proposal untuk kelompok usaha pengelola pantai untuk diantar kepada pemerintah supaya menurunkan bantuan usaha. Namun, masyarakat lokal sendiri belum mempunyai prakarsa untuk mengajukan proposal bantuan usaha mengingat umumnya mereka belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana mengembangkan usaha wisata.

4. Potensi Objek Retribusi Pantai Base-G

Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kekuatan untuk dikembangkan melalui usaha-usaha terencana dan terprogram melalui strategi-strategi perencanaan yang tepat agar memperoleh hasil yang maksimal sesuai yang ditargetkan (Lukman Ali, 1996 : 784).

Pada beberapa tahun terakhir, terutama sejak awal 2000-an, lokasi Pantai Base-G sudah mulai dianggap sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Walaupun masih dikelola secara individu dan sederhana, masyarakat daerah kampung kayubatu sudah merasakan manfaat adanya nilai tambah dari tanah mereka berupa uang, sehingga sebagian besar dari mereka berharap supaya wilayah pantai Base-G dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi objek wisata yang benar-benar menarik dan semakin banyak di kunjungi wisatawan. Mereka merasa bahwa nilai tambah dari tanah berupa uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut telah memberikan jaminan bahwa kebutuhan keluarga mereka akan semakin dapat terpenuhi bila pengelolaan wisata pantai tersebut dapat dilaksanakan secara baik. Langkah umum yang dilakukan oleh warga masyarakat Kampung Kayu Batu untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Pantai Base-G adalah dengan membersihkan daerah-daerah pinggir pantai yang mempunyai pemandangan indah sesuai bagian lahan yang dimiliki secara adat maupun individu. Setelah itu mereka membuat tempat-tempat duduk yang dapat digunakan oleh para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai, dan dapat mereka tarik sewa atas penggunaan tempat wisata itu. Karena keterbatasan dan kapasitas

pembangunan struktur yang lebih kompleks dan modern, maka kebanyakan dari mereka hanya menggunakan fasilitas buatan mereka sendiri seadanya dengan hasil yang seadanya pula.

Dalam kegiatan sehari-hari, Pengelolaan bagian kiri maupun kanan pantai ini dilakukan masing-masing marga yang tinggal di Kampung Kayu Batu atau anggota keluarga yang memiliki hubungan dengan penduduk kampung, baik melalui jalur kekeluargaan, perkawinan atau, hubungan kerja. Selain itu mereka juga berperan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di laut bagi para wisatawan yang berisiko tenggelam di laut maupun keamanan di lokasi pantai. Selain berperan sebagai pengaman swakarsa di lingkungan obyek wisata Pantai Base G, ada juga warga masyarakat di Kampung Kayu Batu yang berperan sebagai tukang ojek, yang pada dasarnya sangat membantu kunjungan wisatawan ke obyek wisata tersebut. Ada tukang ojek yang bergerak sendiri, tetapi ada juga tukang ojek yang telah terlibat dalam perkumpulan tukang ojek. Jasa angkutan ini sangat membantu angkutan umum yang beroperasi di lahan Pantai Base G. Lokasi pangkalan tukang ojek ini cukup dekat dengan lokasi wisata pantai, yaitu sekitar 30 meter, tepatnya di depan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) Kota Jayapura. Di wilayah ini, tarif ojek dari pangkalan ke pantai Base G adalah sekitar Rp.5.000,-. Jasa angkutan ini telah tersedia setiap hari dari pagi sampai malam hari, apalagi pada akhir pekan atau hari-hari libur. Ketersediaan ojek ini memudahkan wisatawan.

Pada umumnya, tukang ojek di kawasan Pantai Base G adalah masyarakat yang berdomisili di daerah Deplat dan Kampung Kayu Batu. Mereka umumnya berasal dari Papua, walau ada juga non-Papua. Tukang ojek tidak hanya melayani penumpang yang akan ke Pantai Base G, tetapi juga melayani penumpang yang akan bergerak menuju Kampung Kayu Batu dan sekitar kompleks Deplat Kanan dan Deplat Kiri. Tukang ojek ini umumnya memiliki penghasilan tambahan yang memadai, khususnya di akhir pekan dan hari-hari libur, terutama dari pengunjung yang datang tanpa kendaraan sendiri secara berombongan. Karena itu, dilihat dari sisi ekonomi, pembangunan obyek wisata Pantai Base G cenderung meningkatkan kesejahteraan masyarakat walaupun tetap ada keprihatinan rendahnya penghasilan yang mereka peroleh setiap hari karena pengelolaan pantai yang dilakukan selama ini sederhana. Tanpa ada tukang ojek ini, banyak wisatawan tidak merasa nyaman, khususnya bila mereka datang sendiri dari jauh tanpa kendaraan pribadi.

Dengan adanya perkembangan objek dan atraksi wisata di Pantai Base G tersebut, masyarakat Kampung Kayu Batu sangat berharap Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Pariwisata, dapat terlibat aktif untuk mendukung pengembangan objek dan atraksi wisata pantai tersebut. Dukungan tersebut dapat diberikan dalam pembangunan infrastruktur jalan melalui pengaspalan jalan pantai dan pengadaan transportasi yang mempermudah wisatawan untuk berkunjung ke obyek wisata. Pemerintah Kota Jayapura juga dapat membangun fasilitas umum yang lainnya di lokasi pantai berupa fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK), menyediakan alat penerang berupa lampung di sepanjang Pantai Base G, dan

penyediaan air bersih. Akhirnya, Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang memudahkan wisatawan untuk menikmati keindahan pantai dalam waktu lebih lama dengan suasana lebih nyaman seperti tempat istirahat (*shelter*), akomodasi, atau tempat khusus kuliner. Namun, masyarakat setempat, khususnya para pemilik tanah adat di pinggir Pantai Base G, berharap bantuan tersebut diberikan sukarela, dalam arti bahwa Dinas Pariwisata tidak perlu mengambil retribusi objek wisata tersebut karena pengelolaannya tetap dilakukan secara tradisional yaitu diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat setempat. Mengenai hal ini, salah satu informan menyatakan sebagai berikut:

“Pemerintah Kota pernah datang kemari untuk menawarkan pengelolaan wisata di Pantai Base G. Tetapi kami belum dapat menerima karena harus ada kesepakatan dari kita untuk membagi hasilnya. Kami tentu keberatan, karena selama ini kami yang mengelola dan kami tidak pernah membagi hasil pengelolaan itu. Ini adalah tanah ulayat, sehingga hasil pengelolaan wisata di pantai ini hanya untuk kami. Artinya, kami tidak mungkin untuk membagikannya kepada pemerintah.”

“Kita mau saja Pemerintah ikut mengelola, tapi kita sebagai pemilik tanah adat ingin pembagian yang adil. Pemerintah ingin sistem pembagian dari pendapatan itu adalah 60% persen untuk pemerintah dan 40% untuk kita. Tentu saja, kami keberatan. Kami ingin, pembagian pendapatan itu justru sebaliknya. Kita sebagai pemilik tanah adat mendapatkan 60%, sementara pemerintah mendapat 40%.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa masyarakat adat di Kampung Kayu Batu sangat berharap supaya Pemerintah Kota Jayapura terlibat aktif dalam pembangunan obyek dan atraksi wisata di Pantai Base G. Akan tetapi, masyarakat setempat dengan tegas menyatakan bahwa pengelolaan itu tetap harus diberikan sepenuhnya kepada masyarakat lokal, dan hasil pengelolaan tersebut hanya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal yang mengelolanya. Alasan utamanya adalah tanah di Pantai Base G adalah tanah adat, sehingga hasil pengelolaannya tidak dapat dibagikan kepada pemerintah.

Dari hasil wawancara dengan wisatawan, 10 dari 15 wisatawan setuju jika di berlakukan pungutan retribusi. Dengan perincian sebagai berikut :

- Pejalan Kaki Rp. 2000,-
- Parkir Motor Rp. 5.000,-
- Parkir Mobil Rp. 10.000,-
- Parkir Truck/Bus Rp. 25.000,-

Tabel 2. Pungutan Retribusi Parkir Motor

Hari	Jumlah Wisatawan (orang)	Retribusi (Rp)	Pendapatan yang di hasilkan per hari (Rp)	Total Pendapatan Per Tahun (Rp)
Senin-Jumat	30	5.000	150.000	7.950.000
Sabtu	200	5.000	1.000.000	53.000.000
Minggu (hari libur)	800	5.000	4.000.000	212.000.000
Total Pungutan Retribusi			5.150.000	272.950.000

Sumber : Hasil Survei, 2014

Tabel 3. Pungutan Retribusi Parkir Mobil

Hari	Jumlah Wisatawan (orang)	Retribusi (Rp)	Pendapatan yang di hasilkan per hari (Rp)	Total Pendapatan Per Tahun (Rp)
Senin-Jumat	30	10.000	300.000	15.900.000
Sabtu	200	10.000	2.000.000	106.000.000
Minggu (hari libur)	500	10.000	5.000.000	265.000.000
Total Pungutan Retribusi			7.300.000	886.900.000

Sumber : Hasil Survei, 2014

Tabel 4. Pungutan Retribusi Parkir Truck/Bus

Hari	Jumlah Wisatawan (orang)	Retribusi (Rp)	Pendapatan yang di hasilkan per hari (Rp)	Total Pendapatan Per Tahun (Rp)
Senin-Jumat	5	25.000	125.000	6.625.000
Sabtu	20	25.000	500.000	26.500.000
Minggu (hari libur)	100	25.000	25.000.000	1.325.000.000
Total Pungutan Retribusi			25.625.000	1.358.125.000

Sumber : Hasil Survei, 2014

Tabel 5. Pungutan Retribusi Pejalan Kaki

Hari	Jumlah Wisatawan (orang)	Retribusi (Rp)	Pendapatan yang di hasilkan per hari (Rp)	Total Pendapatan Per Tahun (Rp)
Senin-Jumat	50	2.000	100.000	5.300.000
Sabtu	500	2.000	1.000.000	53.000.000
Minggu (hari libur)	1.500	2.000	3.000.000	159.000.000
Total Pungutan Retribusi			4.100.000	217.300.000

Sumber : Hasil Survei, 2014

Dari data ini menunjukkan bahwa pendapatan yang dapat dihasilkan dari pungutan retribusi parkir motor per tahun mencapai Rp.272.950.000,-. Untuk pungutan retribusi parkir mobil per tahun mencapai Rp.886.900.000,-. Pungutan retribusi parkir truck/bus per tahun mencapai Rp.1.358.125.000,-. Untuk pejalan kaki pungutan retribusi pertahun mencapai Rp.217.300.000,-. Keseluruhan total pendapatan yang di hasilkan dari objek wisata Pantai Base-G per tahun yaitu mencapai Rp.2.725.275.000,-.

5. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kurang Optimalnya Pungutan Retribusi Dalam Pengelolaan Pantai Base-G

Jika diamati secara lebih mendalam, pengelolaan objek wisata Pantai Base-G dikampung Kayubatu cenderung mengalami banyak kendala yang belum bisa diselesaikan dengan baik hingga sekarang. Kendala ini dihadapi oleh pihak-pihak yang terkait dengan pemanfaatan objek wisata Pantai Base-G tersebut, baik bagi penduduk lokal pengelola bagian-bagian lahan yang dimiliki per marga masing-masing. Dispenda Kota Jayapura maupun Dinas Pariwisata Kota Jayapura, maupun wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut.

Sistem Kekerabatan atau Kekeluargaan

Dengan system kekerabatan atau kekeluargaan yang di terapkan selama ini, pengelolaan lokasi objek wisata Pantai Base-G cenderung hanya dilakukan secara bersama, misalnya dalam bentuk persekutuan antara masyarakat lokal sendiri. Dampaknya adalah terjadinya hambatan dalam pengembangan wisata pantai agar lebih meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke lokasi wisata. Keadaan ini ternyata sangat di persulit oleh adanya sengketa tanah adat di antara pemilik bagian-bagian lahan per marga pada lokasi yang belum dapat di selesaikan dengan tuntas. Dalam hal ini, masing-masing pemilik lokal belum bersedia melepaskan hak pengelola berbasis kepemilikan tanah adat kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini kepada Dispenda dan Dinas Pariwisata Kota Jayapura, akibat ketakutan bahwa mereka tak akan memperoleh hasil financial dari hasil pengelolaan objek wisata pantai yang telah dilakuka secara tradisional selama ini.

Dengan adanya tendensi pengelolaan tradisional oleh pemilik lokasi wisata secara individual, maka pemilik usaha di masing-masing lokasi yang dimiliki dan dikelola per marga cenderung tidak mau membuka diri untuk bekerjasama dengan pihak lain, dalam konteks ini Dispenda dan Dinas Pariwisata Kota Jayapura untuk pengembangan wisata pantai ke depan. Dampak ikutan dari keengganan penduduk local untuk bersikap terbuka terhadap ajakan Pemerintah Kota Jayapura adalah kurangnya perbaikan infrastuktur jalan dan transportasi, sarana penerangan jalan di sepanjang Pantai Base-G, maupun fasilitas umum lainnya seperti MCK, tempat-tempat peristirahatan, dan fasilitas kuliner. Padahal, jika masyarakat pemilik lokasi usaha mau membuka diri terhadap apa yang di berikan sebagai bantuan usaha dalam pengembangan objek wisata pantai base-g, maka mereka pada dasarnya dapat lebih mengembangkan berbagai usaha lain sesuai dengan apa yang diharapkan oleh wisatawan.

Kegagalan Koordinasi Pengelolaan Pantai Base-G

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata Kota Jayapura telah memahami bahwa lokasi wisata Pantai Base-G tidak akan pernah mengalami perkembangan fisik yang berarti bila sarana dan prasana yang menunjang untuk bisa menarik wisatawan berkunjung masih kurang atau tidak memadai.

Idealnya, setiap objek wisata pantai memiliki sarana jalan yang sudah diaspal dengan baik, ada lampu-lampu penerang di sepanjang pantai, adanya tempat-tempat istirahat, tersedianya berbagai macam kuliner, tersedianya tempat penyewaan alat olahraga air dan lainnya. Akan tetapi pembangunan infrastruktur dan fasilitas itu selama ini tidak dapat berjalan dengan baik akibat kurangnya kerjasama penduduk setempat, terutama para pemilik atau pengelola usaha di bagian-bagian lahan yang dikelola. Mereka masih bersikukuh untuk menerapkan ongkos parkir atas setiap pengunjung yang memarkir kendaraan dan menggunakan area wisata pantai pada lokasi yang di kelola secara pribadi, walau sudah dianjurkan supaya wisatawan tidak dimintai ongkos parkir lagi karena telah membayar parkir di pintu masuk yang dikelola oleh Dispenda dan Dinas Pendapatan Kota Jayapura.

Bagi Pemerintah Daerah sendiri, terutama Dispenda Kota Jayapura, tidak adanya kerjasama dari masyarakat setempat itu juga menimbulkan dampak bahwa Dispenda tidak dapat menarik retribusi. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum pada lokasi wisata tersebut tentu saja memerlukan biaya yang tidak sedikit, akan tetapi masyarakat pemilik lokasi tetap tidak mau bekerjasama dalam pengelolaan dan pembagian hasil dari usaha wisata pantai ini, sehingga pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum bagi objek wisata pantai juga terbatas.

Selain itu, tanpa adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat setempat, Pemerintah Kota Jayapura juga tidak dapat memelihara infrastruktur dan fasilitas umum yang sudah dibuat. Tanpa adanya rasa memiliki, masyarakat setempat tidak mau terlibat dalam memelihara infrastruktur maupun fasilitas umum yang telah dibangun oleh Dinas Pariwisata Kota Jayapura. Kasus yang paling nyata bisa dilihat di lapangan selama ini adalah adanya tempat-tempat peristirahatan yang tidak terurus dengan baik. Padahal, idealnya jika Pemerintah Kota Jayapura diberi kesempatan untuk ikut mengelola objek wisata tersebut dalam kerjasama dengan para penduduk lokal, maka pembangunan dan perawatan dan fasilitas umum tersebut dapat di lakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri dengan dana dari pajak dan retribusi pengelolaan objek wisata pantai tersebut. Hanya saja, hal ini tidak dapat terwujud karena kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kota Jayapura dan masyarakat pemilik atau pengelola lokasi wisata tidak dapat tercapai dan di laksanakan dengan baik.

Kurang berhasilnya kerjasama yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dispenda dan Dinas Pariwisata Kota Jayapura tersebut sangat di pengaruhi pula oleh masih kurangnya tradisi koordinasi melalui dialog-dialog antara pihak Pemerintah Kota Jayapura, khususnya Dinas Pariwisata , pimpinan adat atau pengelola lokasi wisata Pantai Base-G. lemahnya koordinasi ini sangat mengganggu kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota Jayapura, baik berupa infrastruktur jalan, transportasi dan fasilitas-fasilitas umum yang lain dilokasi objek wisata. Kondisi seperti itu menjadi salah satu factor penghambat proses pengembangan pariwisata Pantai Base-G pada masa mendatang.

Rasa Kurang Nyaman di Kalangan Wisatawan

Bagi pengunjung di Pantai Base-G, banyak kendala masih dapat di temui di wilayah pantai, yang menyebabkan mereka enggan datang berkunjung lagi atau berkunjung dalam frekuensi lebih tinggi.

- *Kurang nyamannya fasilitas umum yang tersedia*

Sebagaimana telah dikemukakan tadi, sistem pengelolaan obyek wisata di Pantai Base G masih banyak didasarkan kepada sistem kekerabatan atau kekeluargaan. Dengan sistem ini pengelolaan lokasi wisata pantai otomatis diserahkan kepada pemilik dan/atau pengelola bagian-bagian lahan dan hasil pengelolaan itu dinikmati sendiri sesuai dengan besarnya jumlah pengunjung yang menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di lokasi yang mereka kelola. Kondisi ini memiliki dampak yang kurang baik di kalangan pengunjung. Para wisatawan menganggap masyarakat belum mampu mengelola objek wisata Pantai Base-G secara efektif, karena keterbatasan kemampuan ekonomi dan juga pengetahuan yang mereka miliki. Masyarakat lokal belum mampu berpikir secara komprehensif untuk mengembangkan obyek wisata Pantai Base G secara kolektif dan terpadu untuk kemajuannya di masa yang akan datang. Dampaknya adalah bahwa wisatawan hanya akan dapat menikmati fasilitas umum yang sama, sederhana, dan makin lama akan makin usang tanpa pemeliharaan memadai. Tanpa perbaikan fasilitas umum tersebut, wisatawan merasa bahwa biaya yang sudah dikeluarkan untuk sampai dan tinggal sejenak di sana tidak dapat sebanding dengan rendahnya kualitas kenyamanan fasilitas pelayanan yang diberikan.

- *Tidak seragam dan tingginya ongkos penggunaan fasilitas Pantai Base G*

Pemerintah Daerah, khususnya Dispenda Kota Jayapura, memang sudah berusaha untuk menerapkan kebijakan tarif retribusi Pantai Base G tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat setempat. Di dalam tarif itu, wisatawan otomatis akan mendapatkan asuransi Jasa Raharja, yang dapat menjamin kenyamanan mereka saat berwisata bila sampai terjadi kejadian kecelakaan yang tidak diinginkan, misalnya tenggelam di laut. Hanya saja, kebijakan tarif di pintu masuk saja tidak diakui oleh masyarakat di bagian-bagian lahan lokasi wisata yang dimiliki dan/atau dikelola per marga, sehingga wisatawan seringkali harus membayar dua kali, yaitu: di pintu masuk obyek wisata dan pada masing-masing lokasi tempat mereka memarkir kendaraan dan beristirahat. Pengunjung merasa tidak puas dengan sistem pembayaran masuk dan pemakaian fasilitas yang ada di Pantai Base G. Hal ini terjadi karena pengelolaan atas lokasi wisata pantai ini dikelola secara tradisional oleh pemilik/pengelola setiap marga. Walaupun sudah ada pengelolaan oleh Dinas Pariwisata atas biaya loket masuk, masyarakat pemili/pengelola lahan tetap saja menarik bayaran atas lokasi yang dijadikan parkir dan tempat istirahat. Akibatnya, beban biaya masuk dan pemakaian fasilitas objek wisata menjadi besar.

Selain itu, penetapan ongkos untuk pemakaian lahan lokasi wisata juga cenderung berbeda-beda setiap marga, sehingga tak jarang ditemukan kasus penetapan tarif yang sangat tinggi. Tingginya ongkos ini ditemukan pada setiap lokasi yang terdapat pondok duduk dan tempat beristirahatnya, dengan tingkat tarif yang tidak seragam dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Pengelolaan per marga telah menyebabkan tidak seragamnya penentuan biaya wisata di Pantai Base G, yang berdampak sangat besar secara finansial bagi wisatawan, khususnya bila wisatawan berkunjung ke obyek wisata Pantai Base G dalam bentuk rombongan 10 sampai 100 orang. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, dapat diperkirakan kenyamanan wisatawan akan terganggu dan membuat mereka tidak terdorong berkunjung kembali pada masa yang akan datang.

Mengenai tarif yang tidak normal ini, dapat diketahui bahwa tarif masuk pantai yang diterapkan selama ini adalah Rp2.000,00 per orang. Hanya saja, walau sudah membayar tarif masuk, wisatawan tetap diminta biaya per tempat duduk oleh masing-masing pemilik atau pengelola bagian-bagian lahan sebesar Rp50.000-Rp300.000 untuk tempat pondok atau istirahatnya.

Selain itu, ada juga harga yang dikenakan tidak tentu, karena dapat terjadi tawar-menawar antara pengelola dan pengunjung. Tergantung dari pengunjung yang bersedia bayar berapa untuk satu tempat duduk keluarga, di mana dalam kenyataannya paling murah Rp50.000,- dan paling mahal Rp300.000,-.

- *Kurangnya keamanan dan kenyamanan akibat kebiasaan mabuk*

Salah satu kondisi yang masih sering dijumpai pada lokasi wisata Pantai Base G dan tidak disenangi wisatawan adalah adanya petugas yang jaga di pintu masuk bagian barat meminta ongkos masuk dalam keadaan mabuk atau terpengaruh oleh minuman beralkohol. Kondisi mabuk seperti itu otomatis membuat wisatawan tidak respek terhadap petugas dan sangat tidak nyaman melihat pemandangan pengelolaan obyek wisata seperti itu. Selain itu, ketika sudah memasuki pantai, masih sering dijumpai pula para pemilik/pengelola yang sedang mabuk sehingga mengganggu kenyamanan para wisatawan yang berkunjung ke lokasi usaha mereka. Akhirnya, masih sering ditemukan pula wisatawan yang masih dalam keadaan mabuk tetapi nekat berenang sehingga menimbulkan masalah keamanan bagi wisatawan yang sedang menikmati acara rekreasi pribadinya atau rekreasi bersama dengan rombongannya.

Salah satu kondisi yang tidak sedap dipandang di wilayah Pantai Base G adalah adanya orang mabuk dan polisi yang berpatroli kurang mampu menangani karena patroli hanya dilakukan dalam waktu-waktu tertentu saja tidak setiap hari. Akibatnya adakalanya ada orang sedang mabuk berada di luar kontrol dari polisi yang berpatroli dan kenyamanan wisatawan sangat terganggu serta cenderung menghambat perkembangan wisata di Pantai Base G.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dalam setahun pendapatan yang bisa di hasilkan dari loket masuk objek wisata Pantai Base-G saat ini yaitu berkisar antara Rp.76.800.000,-Rp.96.000.000,- ini terlepas dari setiap tempat/lokasi yang terdapat di dalam objek wisata tersebut. Sedangkan perhitungan setelah adanya retribusi total pendapatan yang di hasilkan per tahun dari objek wisata Pantai Base-G yaitu mencapai Rp.2.725.257.000,-.

Masih kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk bisa menarik wisawan lebih banyak lagi, seperti sarana jalan yang belum di aspal, belum ada lampu penerang dan belum adanya air bersih serta fasilitas sarana dan prasara, tempat makan dan lain sebagainya. Hal ini karena sarana prasarana yang ada masih dikelola sangat sederhana. Tarif juga masih beragam sesuai dengan keinginan pemilik tempat. Bahkan ada anggapan dari pengunjung bahwa Pantai Base-G adalah pantai yang paling mahal di kota Jayapura.

Masih kurangnya tingkat koordinasi melalui dialog-dialog antara pemerintah daerah setempat, terutama, Dinas pariwisata kota, pemerintah kelurahan Tanjung Ria dengan pimpinan adat atau Ondoafi Kampung Kayubatu, serta para pemilik / pengelola lokasi wisata pantai Base G. Hal ini menjadi salah satu faktor Penghambat dalam proses pengembangan pariwisata pantai Base G.

Para pemilik lokasi pantai Base G sangat menginginkan adanya peran aktif pemerintah daerah setempat yang dapat bekerja sama dengan mereka untuk memajukan industri pariwisata di pantai Base G. Masyarakat pemilik hak ulayat dalam proses pemerintah khususnya dalam pengelolaan industri pariwisata di pantai Base G, dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada di tempat lain di kota jayapura.

Mereka menginginkan supaya pemerintah membangun kamar mandi jalan yang ada diperbaiki dan di aspal, memasang lampu penerang di jalan pantai, air bersih dan juga di setiap lokasi di sediakan tempat-tempat sampah, kemudian masyarakat juga menginginkan ada kerjasama dengan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata supaya pantai Base G lebih maju lagi, apabila ada investor yang mau bekerja sama dengan masyarakat. Retribusi dari objek wisata Pantai Base-G di kota Jayapura adalah salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penanganannya masih dilaksanakan oleh masyarakat lokal sebagai pemilik hak ulayat, belum ada campur tangan pemerintah Daerah. Apabila penanganannya dilakukan secara intensifikasi dan ekstensifikasi, maka Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dan sangat potensial sekali.

2. Saran

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses pengembangan pariwisata dipantai Base G. Maka diperlukan pelayanan wisata yang baik bagi wisatawan, penyediaan fasilitas dan sarana penunjang

yang dapat di atur secara mandiri, berdasarkan proses dan program pelatihan bagi pemilik/pengguna lokasi pantai untuk meningkatkan kinerjanya.

Program penyuluhan adalah program yang cukup dan bermfaat bagi orang kampung untuk memahami serta, para pengelola lokasi pantai base-g memiliki modal untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses pengembangan pariwisata di pantai Base G.

Pendampingan. Dengan adanya pendampingan secara terus menerus kepada pihak pengelolah pantai, maka prospek pengembangan wisata patai Base G dapat berkembang sesuai dengan visi dan misi pemilik lokasi, pemerintah kota jayapura dan pihak lainnya, yaitu untuk meningkatkan minat dari para wisatawan berkunjung ke pantai Base-G.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyaningrum, RO, 2013, *Jurnal Perkembangan Objek Wisata Umbul Sewu dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Pengging dan Sekitar*.
<http://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sejarah/article/view/254/303>
- Elfianti, L, 2011, *Potensi dan Strategi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Studi Kasus di Kabupaten Sijunjung*, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammad Yamin Solok.
- Hamadi, MR, 2009, *Pengaruh Pengembangan Sektor Pariwisata di Pantai Hamadi terhadap Masyarakat Desa Tobati Kota Madya Jayapura, Jayapura* : Skripsi Fakultas Ekonomi UNCEN Jayapura.
- Moh. Manshur Hidayat & Surochiem As, 2008, *Artikel Maritim : Pokok-Pokok Strategi Pengembangan Masyarakat Pantai Dalam Mendorong Kemandirian Daerah*, Ridev Institute Surabaya.
- Nurmalasari, Y, 2009, *Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat*. [www. Stmik-im.ac.id/userfiles/jurnal%20yessi.pdf](http://www.stmik-im.ac.id/userfiles/jurnal%20yessi.pdf).
- Rantetadung, M, 2012, *Analisis Pengaruh Dukungan Pemerintah dan Kunjungan Wisatawan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire*. Jurnal Agroforestri VII Nomor 1 Maret 2012
- Saputro, E. 2012, *Potensi dan Pengembangan Objek Wisata Kampung Nelayan Pantai Drini DiKabupaten Gunungkidul, Surakarta* : Laporan Tugas Akhir Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.